

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arba, 2015, *"Hukum Agraria Indonesia"*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamidi, Jazim, Moch. Adi Sugiharto, dan Muhammad Ihsan, dkk, 2013, *"Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer"*, Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Hart, H.L.A, 2021, *"Keadilan dan Moralitas Seri Konsep Hukum Doterjemahkan dari Judul ; karya H.L.A. Hart, The Concept of Law (New York; C;erendom Press-Oxford, 1997)"*, Nusamedia.
- Limbong, Benhard 2015, *"Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan"*, Margaretha Pustaka, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *"Penelitian Ilmu Hukum Edisi Revisi"*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009. *"Pengantar Ilmu Hukum"*, Kencana, Jakarta
- Prasetyo, Teguh, 2018, *"Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum"*, Nusamedia, Bandung,
- Sihombing, Irene Eka, 2005, *"Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan"*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta
- Sugiyanto dan Leliya, 2017, *"Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Sebuah Analisis Dalam Perspektif Hukum & Dampak Terhadap Perilaku Ekonomi Masyarakat"*, CV. Budi Utama, Jakarta
- Sumardjono, Maria, S.W., 2015, *"Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia dari Keputusan Presiden sampai Undang-Undang"*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Sumardjono, Maria S.W., 2019, “ *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*”, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Sutedi, Adrian, 2020, “*Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Di Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*”, Sinar Grafika, Jakarta

Zaman, Nurus, 2016, “*Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*”, PT. Refika Aditama, Bandung

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 14).

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 595).

C. PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor
37/PDT.G/2018/PN.KWG tanggal 26 Juni 2018

Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor
17/PDT.G/2020/PN.SMD tanggal 22 Juni 2020

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 473
K/PDT/2019 tanggal 21 Februari 2019

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3461
K/PDT/2020 tanggal 11 November 2020

D. JURNAL

Bahder Johan Nasution, *“Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”*, Penelitian Dosen Hukum Tetap Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Budiono, Arief , *“Teori Utilitarianisme dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian dari Alih Fungsi”*, Jurnal Jurisprudence, Vol.9 No. 1, 2019.

Julyano, Mario, Aditya Yuli Sulistawan, *“Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”*, Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019.

Kurnia, Titon Slamet , *“Hukum dan Keadilan : Isu Bagian Hulu dan Hilir”*, Refleksi Hukum , Vol 10, No.1.

Muslih, M., “*Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radburch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*”, Legalitas, Volume IV, Nomor 1, Juni 2013.

Sahnan, M. Yazid Fathoni dan Musakir Salat, “*Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pembebasan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*” Jurnal IUS, Vol. III, Nomor 09, Desember 2015.

E. Sumber-sumber lain

CNN Indonesia, Asal Muasal Proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210902131835-92-688785/asal-muasal-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung>.

Epstein , Richard A and Eduardo M Penalver, The Fifth Amendment Takings Clause, <https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/interpretation/amendment-v/clauses/634>.

Komite Penyusunan Standar Penilaian Indonesia (KPSPI) Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Petunjuk Teknis SPI 306.

Lubis, Abu Samman, Balai Diklat Keuangan Balikpapan, Balikpapan, “ *Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sanksi Hukum dalam Pelaksanaan Anggaran*” <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-balikpapan-tanggung-jawab-pejabat-pembuat-komitmen-ppk-dan-sanksi-hukum-dalam-pelaksanaan-anggaran-2019-11-05-655145b0/>.

Reza, Muhammad, “*Keadilan Hukum*”, <https://www.metrokaltara.com/keadilan-hukum/>